BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang peran komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi NTB maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan variabel fungsi dan kewajiban Komisi Informasi Provinsi NTB yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Komisi informasi yakni melaksnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informsai Publik. Dalam hal ini Komisi Informasi bertugas menerima dan memeriksa permohonan sengketa informasi publik sekaligus memutuskan sengketa informasi melalui jalur mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut sebagian besar sengketa yang ditangani Komisi Informasi NTB dapat ditangani melalui jalur mediasi.
2. Sedangkan berdasarkan variabel evaluasi dan sanksi menunjukkan bahwa dalam hal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan oleh badan publik yaitu dengan mengirim kuisioner kepada badan publik yang berisi mengenai kinerja PPID. Bagi badan publik yang dikategorikan berhasil melaksanakan keterbukaan informasi akan diberikan peringkat baik dan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan. Sedangkan badan publik yang tidak memiliki kinerja baik dalam melaksanakan keterbukaan

infromasi Komisi Informasi akan memberikan pengarahan dan pembinaan. Komisi infroamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk karena bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi.Adapun jika badan publik tidak memberikan informasi sesuai dengan keputusanKomisi informasi maka pemohon dapat melakukan pengajuan keberatan ke peradilan umum untuk menuntut kembali badan publik yang tidak memberikan informasi sesuai dengan hasil yang diputuskan oleh komisi informasi provinsi NTB.

5.2 Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPID di setiap badan publik maka diharapkan Komisi Informasi Provinsi NTB untuk memantau setiap informasi publik yang diinginkan oleh pemohon informasi tetap tersedia di PPID.
2. Diharapkan kepada komisi informasi untuk memantau Website setiap badan publik agar selalu di update terutama seputar informasi terkait profil badan publik dan pimpinanya, informasi tentang kegiatan dan kinerja badan publik dikarenakan konten informasi yang ditampilkan tidak legkap, berbeda dan bahkan tidak bisa dibuka.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU - BUKU

Asmana, jamal, ma'mur 2012. *Buku panduan internalisasi pendidikan karakter disekolah*. Yogyakarta: Gafa Pers.

Dafis, Gordon B., 1999, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*: Bagian 1 Pengantar, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Jimy Jase Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaiakan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visi Media Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesi, 1990, Jakarta: Balai Pustaka

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 20. Remaja Rosdakarya. Bandung 2010.

Moleong L. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja karya. Bandung.2015

Restu Kartiko Widi, 2010. *Asas Metodelogi Penelitian*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Riyadi 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Mengendalikan Poteni Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta Salemba Empat.

Sarwono Wirawan Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Soeatminah, 1992, *Perpustakaan Kepustakawanan Dan Pustakawan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Suahrsini Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetak ke 21, Alfabeta, Bandung. 2014

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas, Alfabeta, Bandung 2015.

Suhardono, Edy 1994 Peran: *Konsep, Derivasi Dan Aplikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zorkozy, Peter., 1990, *Information Technology*: *An Introduction*. London: Pitman Publishing.

2. JURNAL

Ahmad Subhan, 2016, *Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jambi),* Kajian Volume 21 No 3.

David William, 2006 Edgerson, Dawid E. And William Allan Krintsonis. 2006. "*Analysis Off The Influence Of Pricipal-Teacher Relationship On Student Academic Achievement: A National Focu s"* Doctor Forum, Nasional Journal For Publishing And Monitoring Doctoral Student Research.

Dedi Kurnia Syah Putra, 2018, *Media dan Wacana: Telaah Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Barat*, Vulume 1 No.8

Endang Retnowati, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Dasein Dan Dasolen),* Volume Xvii No.1

Nihlatul Solehah & Cindy Aprianjani, 2019, *Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung*, Volume 1, No. 1

Nunuk Febraningsih, 2012, *Keterbukaan Dalam Infomasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahn Yang Baik*, Volume 1, No.1

Saiydito Hatta, 2018, *Kewenangan Dan Tugas Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Yogyakarta.*

Wahyu Budianto, 2016, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Transformasi. volume 1, No.29

Wulandari, Ratih Florentina, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Informasi*, Jakarta: Uversitas Terbuka

Yori Erdriani, 2016, *Efektifitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik*, Volume 3, No.2

Yusup, Pawit M, 2002, *Hubungan Komunikasi, Informasi, Dan Perpustakaan Pengenalan Study Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, Jurnal Komunikasi dan Informasi.Fikom Unpad

3. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28f.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Poto Kegiatan

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Mataram, 28 November 2019

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH

Nama Mahasiswa	:	Dini Mirya Mugitri
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
NIM	:	216130080
Judul	:	Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus di Komisi Informasi NTB)
Pembimbing	:	L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP

KEGITAN BIMBINGAN SKRIPSI

Tanggal bimbingan	Kegiatan	Paraf Pembimbing
24/02/2020	Perbaiki	
28/02/202	ACC	

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH

Nama Mahasiswa	:	Dini Mirya Mugitri
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
NIM	:	216130080
Judul	:	Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus di Komisi Informasi NTB)
Pembimbing	:	Ayatullah Hadi, M.IP

KEGITAN BIMBINGAN SKRIPSI

	Tanggal bimbingan	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1	18/01/20	Bab V → Penjelas Berdasar variabel → Paraphrase Penjabaran dgn Penjelas Pendahuluan	
2	27/01/20	Bab V – Masukan hasil Wawancara dgn berdasar Instrum Penelitian	
3	07/02/20	Bab V Revisi – Tabel Soal Sanksi Bab V, Susun berdasar kerangka teori	
4	20/02/20	Bab V Perbaiki lagi dengan variabel	
5	[illegible]	Ke Pembimbing II	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 329/II.3.AU/F/II/2020
Lamp. : 1 (satu) exp.
Hal : ***Mohon Sebagai Penguji Skripsi***

Mataram, *05 Jumadil Rajab 1441 H*
29 Februari 2020 M

Kepada
Yth. : 1. Bapak / Ibu : Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si (PU)
2. Bapak / Ibu : Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PP)
3. Bapak / Ibu : Drs. H. Darmansyah, M.Si (PN)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skr ipsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

Hari / Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020
Pukul : 13.30 Wita – sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fisip UMMAT

Adapun Mahasiswa tersebut :
Nama : **DINI MIRYA MUGITRI**
NIM : 216130080
Jurusan : Sosial
Program Studi : Studi Pemerintahan
Judul Skripsi : ***"Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Komisi Provinsi NTB)".***

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,

Drs. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN.0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Tempat;
2. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 057 /II.3.AU/F/I/2020
Lamp. : Proposal Skrispi
Hal : ***Mohon Ijin Penelitian***

Mataram, 11 Jumadil Awal 1441 H
7 Januari 2020 M

Kepada
Yth : **Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB**
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka meyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan ijin bagi mahasiswa berikut:

1. N a m a : **DINI MIRYA MUGITRI**
2. N I M : 216130080
3. Jurusan : Sosial
4. Program Studi : Studi Pemerintahan
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema / Judul : **"Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus di Komisi Informasi Provinsi NTB)"**
7. Lokasi Penelitian : Komisi Informasi Provinsi NTB

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/ijin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FISIP

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Rektor UMMAT (untuk maklum);
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan (untuk maklum)
3. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : DINI MIRYA MUGITRI

NIM : **216130080**

Judul Proposal : ***Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB)***

No	ASPEK PENILAIAN	Nilai		**BXN**
		BOBOT	**NILAI**	
1	Format Proposal	3	4	
2	KedalamanTinjauanPustaka	3	3	
3	OrisinalitasProposal	3	4	
4	Saran/Pemecahan	3	4	
5	KemampuanmempertahankanProposal	3	4	
6	Bahasa	2	4	
7.	Sikap	2	4	
Jumlah		**19**	73	
Jumlah total Nilai Proposal N= DP I+DP II / 2				

Mataram, 28 Desember 2019

TOTAL BN = 73 / 19 = 3.8

TOTAL B

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP
NIDN. 0825038303

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : DINI MIRYA MUGITRI

NIM : **216130080**

Judul Proposal : ***Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB)***

No	ASPEK PENILAIAN	Nilai		BXN
		BOBOT	**NILAI**	
1	Format Proposal	3	4	12
2	KedalamanTinjauanPustaka	3	4	12
3	OrisinalitasProposal	3	3	9
4	Saran/Pemecahan	3	4	12
5	KemampuanmempertahankanProposal	3	4	12
6	Bahasa	2	4	8
7.	Sikap	2	4	8
Jumlah		**19**		73
Jumlah total Nilai Proposal N= DP I+DP II / 2				

Mataram, 28 Desember 2019

TOTAL BN / TOTAL B = 73 / 19 = 3,84

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB)

Oleh

Dini Mirya Mugitri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal dengan Komisi Informasi. Dengan adanya Komisi Informasi di provinsi dapat membantu masyarakat yang kebingungan ketika ingin memperoleh informasi kepada instansi tertentu tetapi tidak dapat di berikan dan/atau tidak di tanggapi. untuk memperoleh informasi tersebut diadakanlah sidang penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi yang dilakukan dalam dua jalur yaitu jalur Mediasi dan Ajudikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Komisi Informasi sudah melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melaksanakan Undang-Undang serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Komisi infroamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi.

KATA KUNCI : Peran, Komisi Informasi, Penyelesaian Sengketa.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

THE ROLE OF INFORMATION COMMISSION IN THE COMPLETION OF THE PUBLIC INFORMATION DISPUTE (A CASE STUDY IN THE NTB PROVINCE INFORMATION COMMISSION)

By
Dini Mirya Mugitri
Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The government creates an institution which is the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, better known as the Information Commission. The existence of an Information Commission in the province can help people who are confused when they want to acquire information from certain departments but cannot be given and / or not responded. In order to obtain this information, a dispute resolution was held by the Provincial Information Commission which was conducted in two ways, namely the Mediation and Adjudication ways. This research used qualitative methods, qualitative methods are often called naturalistic research methods because the research is conducted in natural conditions. The Information Commission has done its role as what has been stipulated in the KIP Law as an institution that resolves Public Information Disputes in implementing the Law and resolves Public Information Disputes. The information commission only resolved information disputes through mediation and adjudication and did not impose any penalties on public bodies that were considered to be performing poorly because they were not the domain and authority of the Information Commission.

KEYWORDS: Role, Information Commission, Dispute Resolution.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah diselenggarakan **Seminar Proposal Penelitian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS dengan predikat CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE, Mahasiswa :

Nama	:	DINI MIRYA MUGITRI
NIM	:	**216130080**
Jurusan		***Ilmu Pemerintahan***
Program Studi	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Proposal	:	***Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB)***

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	NamaDosen Penguji	NIDN	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP	NIDN. 0825038303	Penguji Ketua	3,8
2	Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP	NIDN. 0816057902	Penguji Anggota	3,8
TOTAL				

$$\text{IPK} : \frac{\text{Jumlah IP}}{\text{JmlhPenguji}} = \frac{7,6}{2} = 3,8$$

Mataram, 28 Desember 2019

TEAM PENGUJI PROPOSAL

Penguji Ketua,	**Penguji Anggota,**
Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP	**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN. 0825038303	**NIDN. 0816057902**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902